

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Esensi pembangunan adalah keseluruhan aktivitas yang berjalan simultan, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi guna mencapai tujuan ke arah perubahan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Seluruh aktivitas tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan, sehingga menjadi pedoman yang representatif dalam meningkatkan nilai tambah dalam upaya pencapaian perubahan tersebut.

Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi terdiri atas formulasi kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) dan perencanaan operasional anggaran (*budget operation planning*). Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisa fiskal, sedang perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumberdaya.

Dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini, perhatian atas perkembangan kondisi perekonomian Provinsi Jambi tetap menjadi fokus perhatian dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, karena bagaimanapun juga ketersediaan dana untuk belanja diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari perkembangan dan prospek perekonomian Provinsi Jambi ke depan. Selanjutnya, ketersediaan dana dalam APBD akan digunakan seoptimal mungkin dalam mendukung jalannya roda pemerintahan dan tingkat layanan yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana yang selama ini diselenggarakan, sehingga dari pelaksanaan fungsi pemerintah tersebut harapan masyarakat dapat diwujudkan, serta tantangan dari pelaksanaan

roda pemerintahan dan pembangunan akan diminimalisir. Dengan demikian, pemerintah yang diberi amanah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan dapat memberikan implikasi yang lebih luas.

Sejak digulirkannya reformasi, upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat merupakan hal yang menjadi perhatian pemerintah, termasuk upaya pembenahan sistem pengelolaan keuangan daerah. Oleh karenanya, sistem pengelolaan keuangan daerah saat ini, sering dihadapkan pada aturan yang sangat potensial dan terkadang mengusik kinerja keuangan daerah. Kondisi ini tidak bisa kita hindari karena aturan-aturan yang dibuat tersebut, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan yang pada gilirannya akan dapat mengurangi kebocoran anggaran dan dapat dihindari pembiayaan yang tidak tepat sasaran.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan KUA ini adalah untuk menentukan kebijakan program prioritas tahun anggaran 2010 yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dialokasikan melalui SKPD, sehingga dapat memenuhi seluruh rencana kegiatan yang sesuai dengan skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, serta agar alokasi sumberdaya dapat digunakan atau dimanfaatkan secara efektif dan efisien, mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis.

Sedangkan tujuannya adalah tersedianya dokumen KUA yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi penentuan kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan yang tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

1.3 Dasar Hukum

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 34 ayat (2), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2008, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, dijelaskan bahwa pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 terkait dengan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah serta kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Sehubungan dengan itu, maka Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD, untuk dibahas bersama dengan DPRD, yang kemudian ditetapkan dalam Nota Kesepakatan mengenai Kebijakan Umum APBD (KUA) dan selanjutnya menjadi pedoman di dalam penyusunan APBD.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 KONDISI EKONOMI MAKRO TAHUN 2008 DAN PERKIRAAN TAHUN 2010

Kondisi ekonomi makro tahun 2008 dan hingga pertengahan tahun 2009 serta perkiraannya tahun 2010 memberikan angin segar bagi pembangunan daerah Jambi. Berdasarkan data statistik, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2008 mencapai angka 7,16 persen, lebih tinggi dari tahun 2007 yaitu 6,82 persen. Namun demikian diperkirakan angka ini akan mengalami penurunan pada tahun 2009 mengingat kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan. Pada triwulan keempat tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tumbuh sebesar 1,7 persen lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2007. Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh tumbuhnya 4 sektor penyumbang terbesar PDRB Provinsi Jambi yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan.

Kualitas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang membaik pada tahun 2007 telah menciptakan lapangan kerja baru dan sekaligus menurunkan pengangguran di Provinsi Jambi. Meskipun belum terlalu signifikan, namun jumlah pengangguran telah ditekan menjadi 74.222 orang pada tahun 2008 dibanding 76.090 orang pada tahun 2007. Dan diprediksi angka ini akan semakin menurun ditahun 2009 seiring dengan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi penduduk miskin.

Sejak paruh ketiga tahun 2007, perekonomian nasional dihadapkan pada gejolak eksternal yaitu, meningkatnya harga minyak mentah dunia yang berimbas kepada fluktuasi harga komoditi dunia lainnya, krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat serta melambatnya pertumbuhan

ekonomi Amerika. Kondisi perekonomian nasional ini tentu saja berimplikasi kepada perekonomian daerah. Besarnya resiko dari gejolak eksternal tersebut, menuntut langkah-langkah jangka pendek yang harus ditempuh serta penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan dalam rangka mengamankan pembangunan.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kebijakan ini telah meningkatkan nilai realisasi investasi PMA yang menggunakan dana rupiah dari Rp 1,78 trilyun tahun 2007 menjadi Rp 1.98 trilyun tahun 2008 atau tumbuh sebesar 11,22 persen. Sedangkan investasi PMA dalam dollar Amerika Serikat tahun 2007 sebesar US\$ 18,23 menjadi sebesar US\$ 20,66 pada tahun 2008. Namun investasi PMDN meningkat dari Rp 8,612 trilyun pada tahun 2007 menjadi Rp 8,838 trilyun tahun 2008 atau setara dengan peningkatan sebesar 2,62 persen. Ini didorong oleh investasi sektor pertambangan dan galian, terutama migas yang tumbuh sebesar 14,67% pada tahun 2008

Selain itu, tumbuhnya perekonomian Provinsi Jambi tidak terlepas dari peran mediasi perbankan dalam menyalurkan dana pada sektor ekonomi produktif. Jumlah kredit yang telah disalurkan selama tahun 2008 sebesar Rp 10,434 trilyun meningkat signifikan dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp 8,357 trilyun atau tumbuh sebesar 24,85 persen. Kontribusi Kredit Usaha Menengah Kecil (KUMK) mencapai Rp 7,746 miliar dengan tingkat pengembalian Rp 10,477 miliar. Pertumbuhan kredit ini telah mendorong peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) baru dari 10.050 unit tahun 2007 menjadi 18.050 unit tahun 2008 atau tumbuh sebesar 79,60 persen, dengan tenaga kerja yang terserap sebanyak 19.700 orang. Demikian juga nilai ekspor meningkat dari US\$ 667.35 juta menjadi US\$ 848.345 juta tahun 2008 atau tumbuh sebesar 42,10 persen. Sektor perdagangan secara umum meningkat sebesar 9,4 persen, namun nilai impor mengalami penurunan sebesar 31,71 persen dari US\$ 159,155 juta pada tahun 2007 menjadi US\$ 108.681 juta tahun pada tahun 2008.

Penurunan ini terkait dengan terjadinya disinsentif pasar uang dengan adanya apresiasi nilai Dolar Amerika terhadap Rupiah.

Peningkatan kegiatan ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 7.16 persen juga telah mendorong pertumbuhan lapangan kerja sebesar 3,12 persen, yaitu dari 1.147 juta orang tenaga kerja tahun 2007 menjadi 1.183 juta orang tahun 2008 atau terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak 35.812 orang. Peningkatan kesempatan kerja ini telah menurunkan angka pengangguran terbuka dari 76.090 orang tahun 2007 menjadi 74.222 orang pada tahun 2008 atau terjadi penurunan sebesar 2,45 persen. Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi juga memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja dengan meningkatkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dari Rp 658.000,- pada tahun 2007 menjadi Rp 724.000 pada tahun 2008 serta meningkat lagi menjadi Rp 800.000 pada tahun 2009 sesuai SK Gubernur Jambi Nomor 405/Kep.Gub/Disnaker-trans/2008.

2.2. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2010

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi menitikberatkan pada upaya menjembatani peningkatan investasi, ekspor dan pengeluaran pemerintah serta mendorong peningkatan sektor pertanian, industri pengolahan, menggerakkan UKM dan sektor pariwisata melalui peningkatan infrastruktur pendukung sesuai program nasional. Peningkatan investasi dan ekspor didorong dengan meningkatkan daya tarik investasi baik di dalam maupun di luar negeri, penguatan kapasitas pemerintah melalui upaya mengurangi hambatan prosedural termasuk terhadap peraturan-peraturan daerah yang sifatnya menghambat. Di lain sisi kita juga berupaya untuk meningkatkan, diversifikasi pasar ekspor, mendorong komoditi non-migas yang bernilai tinggi, serta penerimaan lainnya seperti dari sektor pariwisata, perdagangan dan jasa. Perhatian juga akan kita berikan pada upaya untuk meningkatkan investasi dalam kegiatan eksploitasi dan eksplorasi pertambangan. Daya saing industri daerah akan ditingkatkan antara lain dengan memfasilitasi industri hilir komoditi primer

sehingga memiliki nilai tambah serta pemberdayaan penggunaan produk lokal. Disamping hal-hal di atas, investasi juga akan didorong dengan meningkatkan produktivitas dan akses UKM.

Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan terus didorong. Perhatian juga diberikan pada penempatan, perlindungan dan pembiayaan tenaga kerja ke luar negeri. Pembangunan pertanian dan pembangunan perdesaan di dorong melalui peningkatan produksi pangan, produktivitas pertanian secara luas, diversifikasi ekonomi pedesaan, pemantapan status lahan pertanian, serta pengembangan wilayah-wilayah sentra produksi. Upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin juga akan didorong oleh berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan, memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Sejalan dengan itu juga, kita akan terus memperhatikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat utamanya beras dengan harga yang terjangkau yang sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat miskin.

Stabilitas ekonomi dijaga dengan mengamankan pasokan bahan makanan, yang diupayakan dengan meningkatkan produksi bahan pokok dengan penyempurnaan sistem distribusi kebutuhan pokok rakyat.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Salah satu asumsi yang mendasari tersebut adalah kondisi eksternal pada tingkat nasional yang tergambar dalam APBN.

Asumsi awal RAPBN 2010 bersandar pada analisis dan perkiraan pertumbuhan ekonomi 5 hingga 6 persen, tingkat inflasi dijaga di tingkat rendah 4,5 sampai 5,5 persen. Sementara untuk suku bunga antara 6-7 persen, nilai tukar 9.500 sampai 10.500 per US persen, harga minyak pada tahun 2010 diperkirakan US\$ 45 hingga US\$ 60 per barel, dan tingkat produksi minyak 950 sampai 970 juta barel per hari.

Dengan asumsi tersebut, pemerintah akan mengarahkan defisit APBN 2010 sekitar 1,3 persen sebab saat ekonomi menurun maka penerimaan juga mengalami penurunan. dan harga minyak mentah dunia pada tahun 2010 telah diasumsikan berkisar pada U\$ 40-60 per barel, sedangkan produksi minyak nasional diperkirakan masih tetap.

Pada sisi lain, Indonesia kita juga menghadapi kekurangan pasokan daya listrik di berbagai daerah, baik karena alasan operasional dan teknis maupun alasan harga pokok listrik. Kondisi ini juga sangat berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tahun 2010.

Pada tingkat nasional, berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan diharapkan terkait dengan prioritas untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Dengan demikian jumlah penduduk

miskin diperkirakan menurun menjadi 12%-14% dan pengangguran terbuka diperkirakan menurun menjadi 8,5% di tahun 2010

3.2 LAJU INFLASI

Laju inflasi tahunan dihitung secara kumulatif berdasarkan persentase perubahan Indeks Harga Konsumen pada selisih antara tahun perhitungan dan tahun sebelumnya. Awalnya Laju inflasi daerah Jambi dalam kurun waktu tiga tahun sejak 2005 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 16,5 persen menjadi 7,42 persen pada tahun 2007. Pada tahun 2008 laju inflasi membesar menjadi 17,5 persen. Namun hal ini didorong oleh terjadinya resesi global dan stabilitas regional yang berpengaruh terhadap kenaikan indeks yang signifikan. Namun demikian pada tahun 2010 diprediksikan akan kembali sebesar 5-7 persen. Perkiraan sasaran tingkat inflasi yang rendah dan stabil tersebut tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Pencapaian sasaran inflasi tersebut didukung oleh relatif stabilnya harga-harga melalui penyediaan barang-barang kebutuhan masyarakat, hal ini juga dapat terbantu jika nilai kurs rupiah relatif stabil. Jika iklim usaha dan situasi keamanan yang kondusif serta pemerintah daerah mampu mengatasi berbagai hambatan investasi, maka diperkirakan masuknya capital *inflow* ke Jambi melalui investasi baik PMDN maupun PMA.

3.3 PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Peningkatan PDRB dengan estimasi menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada tahun dasar yang ditetapkan dapat menunjukkan perkembangan ekonomi secara riil. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dalam dua tahun terakhir menunjukkan angka yang cukup menggembirakan meskipun fluktuasi ekonomi nasional terus bergejolak. Pada tahun 2007 pertumbuhan

ekonomi Provinsi Jambi sebesar 6,82 persen meningkat hingga mencapai 7,16 persen pada tahun 2008.

Melihat kondisi ekonomi yang berkembang serta memperhatikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tersebut, yang tercermin dari PDRB atas dasar harga konstan pada triwulan I Tahun 2009 menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,70 persen, yang relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan IV tahun 2008 sebesar 1,57 persen, maka diharapkan pada tahun 2009 ini akan dicapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7,2 persen.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang relatif baik tidak terlepas dari peran beberapa sektor ekonomi andalan, antara lain dari sektor pertambangan dan galian sebesar 2,22 persen kemudian sektor pertanian. Perkebunan dan Perikanan sebesar 1,68 persen sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 9,91 persen, sektor industri pengolahan 0,4 persen.

Pada sisi produksi, perkembangan PDRB Provinsi Jambi menunjukkan bahwa sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama tiga tahun terakhir berasal dari sektor Industri pengolahan, sektor pertanian serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kondisi sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan keempat tahun 2008 sebesar 62,60 persen, diikuti oleh sektor pertanian sebesar 0,41 persen serta sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 0,31 persen.

Pada sisi kontribusi (*share*) sektor primer merupakan penyumbang terbesar dari jumlah PDRB Provinsi Jambi yaitu 44,44 persen, diikuti sektor jasa-jasa (*tersier*) sebesar 37,52 persen dan sektor sekunder sebesar 18,04 persen. Nominal dari PDRB Provinsi Jambi atas dasar harga berlaku mencapai Rp 8,21 triliun yang secara sektoral masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 5,60 persen, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 14,70 persen, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 3,53 persen.

Memperhatikan perkembangan pertumbuhan PDRB pada triwulan I, diproyeksikan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi pada tahun 2009 ini masih tumbuh positif. Pengeluaran konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama mendorong pertumbuhan ekonomi Jambi, diikuti dengan net ekspor dan pengeluaran pemerintah. Dari sisi penawaran kontribusi pertumbuhan ekonomi Jambi masih disumbangkan sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan.

Beranjak dari kondisi tersebut, pada tahun 2009, PDRB Provinsi Jambi diprediksikan masih mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp 15,99 Trilyun. Peningkatan ini diasumsikan dengan kondisi politik dan keamanan yang kondusif, sehingga minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah semakin besar

3.4. LAIN-LAIN ASUMSI

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2010 antara lain :

1. Rencana Pemerintah Pusat yang akan menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil sebesar 20% yang juga akan diperhitungkan dalam RAPBD Provinsi Jambi tahun 2010.
2. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Penetapan alokasi anggaran pendidikan yang mencapai 20%, sangat mempengaruhi sisi belanja dari APBD Provinsi Jambi.
4. Upaya untuk menstabilkan ketahanan pangan secara nasional dan diikuti oleh daerah termasuk Provinsi Jambi diperkirakan akan menjaga inflasi pada kisaran 8,0% - 9,0% terutama untuk laju inflasi yang disebabkan kelompok bahan makanan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. PENDAPATAN DAERAH

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan yang akan Dilakukan pada Tahun Anggaran 2010

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penetapan target anggaran pendapatan dan Belanja Daerah 2010, disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi perekonomian nasional saat ini dan prediksi keadaan yang akan datang. Oleh karena itu, berbagai langkah antisipatif dan solusi bagi peningkatan serta penetapan target pendapatan daerah di tahun 2010 perlu didukung, dengan beberapa asumsi dalam penetapan target pendapatan daerah. Sebagai berikut :

1. Penetapan target pendapatan daerah khususnya yang berasal dari PAD sudah sangat maksimal, karena dari angka potensial dan realisasi saat ini terjadi penurunan pendapatan pada tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena krisis global yang melanda sehingga pendapatan
2. Menurunnya daya beli masyarakat khususnya dari pembelian kendaraan bermotor, sehingga secara signifikan akan berpengaruh terhadap penerimaan PKB dan BBNKB, karena adanya lonjakan kenaikan pajak juga akan mempengaruhi sisi pendapatan.
3. Keterbatasan besaran potensi pajak daerah yang sudah optimal di pungut dan retribusi daerah yang bersifat limitatif sebagaimana di atur dalam Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004.

4.1.2. Target Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan Yang Sah

Dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2009 dan perkiraan di tahun 2010, memberikan banyak pelajaran yang berharga untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang strategis dalam meningkatkan

pendapatan daerah pada tahun 2010. Banyak permasalahan dan hambatan yang terjadi di dalam upaya meningkatkan pendapatan, yang memerlukan pengambilan keputusan secara cepat dan akurat. Keterlambatan dalam merespon gejala-gejala eksternal seperti rendahnya kualitas pelayanan terhadap objek pajak akan membuat kehilangan momentum yang membawa konsekuensi pada tidak tercapainya target pendapatan.

Kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2010, diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas fiskal sebagai pencerminan dari kesungguhan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan sumber-sumber potensial daerah dan dana perimbangan untuk mewujudkan otonomi yang didasarkan pada pengoptimalan pemanfaatan dana daerah. Ada beberapa upaya yang dilakukan dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan, **Pertama:** melalui intensifikasi dengan meningkatkan koordinasi kepada instansi terkait terutama yang memiliki peranan secara teknis memungut pajak dan retribusi daerah serta dengan objek pajak kendaraan bermotor. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pajak dari kendaraan bermotor ini dilakukan melalui pendekatan layanan terhadap objek pajak, baik melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada kantor Samsat di setiap Kabupaten. Pada tahun 2010 pemerintah akan diupayakan untuk lebih mengintensifkan data objek pajak yang sudah ada sehingga tidak terjadi penafsiran yang salah dalam penentuan objek pajak. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib, meningkatkan pengawasan dengan melakukan razia bersama dengan instansi terkait terhadap kendaraan yang tidak membayar pajak, menyempurnakan prosedur pembayaran pajak.

Upaya **Kedua** dilakukan melalui langkah ekstensifikasi pendapatan daerah Provinsi Jambi seperti pemungutan pajak air bawah tanah dan air permukaan, alat angkutan diatas air dan bea balik nama kendaraan diatas air, yang pemungutannya baru dilakukan secara intensif pada tahun 2003.

4.1.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target.

Sejalan dengan upaya yang dilakukan di atas, pemerintah akan terus mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak negara yang dibagihasikan ke daerah seperti pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, pajak Penghasilan (PPh OPDN dan pasal 21) dan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pemerintah juga akan melukan peningkatan akurasi data sumberdaya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan.

Tabel. 1. Rencana Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

No	Jenis Pungutan	Pendapatan Tahun 2009 Pasca APBD Perubahan (000)	Rencana Pendapatan Tahun 2010 (000)	Bertambah/ Berkurang (000)	%
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	498.243.991	503.809.785	5.565.794	1,12
1	Pajak Daerah	423.795.726	430.795.726	7.000.000	1,65
2	Retribusi Daerah:	40.450.100	39.681.100	(769.000)	(1,90)
	- Pelayanan Kesehatan	35.004.000	34.000.000	(1.004.000)	(2,87)
	- Pemakaian Kekayaan Daerah	3.979.000	4.199.000	220.000	6
	- Hasil Produksi Usaha Daerah	803.500	868.500	65.000	8
	- Pungutan Komoditi Perkebunan	663.600	613.600	(50.000)	(8)
3	Perusahaan Milik Daerah	9.000.000	9.000.000	-	-
	- Bank Pembangunan Daerah (BPD)				
4	Perusahaan Milik Swasta	426.991	400.000	(26.991)	(6,32)
	- Penyertaan Modal pada PT. JSP	200.000	200.000	-	-
	- Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun ASKRIDA	226.991	200.000	(26.991)	(11,89)
5	Pendapatan Asli Daerah yang Sah lainnya	24.571.174	23.932.959	(638.215)	(2,60)
II	DANA PERIMBANGAN	769.453.510	734.312.750	(35.140.760)	(4,57)
1	Bagi Hasil Pajak	129.185.695	129.185.695	-	-
2	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	131.640.935	131.621.175	(19.760)	(0,02)
3	Dana Alokasi Umum	473.505.880	473.505.880	-	-
4	Dana Alokasi Khusus	35.121.000	-	(35.121.000)	(100,00)
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	25.049.200	-	(25.049.200)	(100,00)
	Total Pendapatan Daerah	1.292.746.701	1.238.122.535	(54.624.166)	(4,23)

4.2. BELANJA DAERAH

4.2.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, yang merupakan rencana keuangan Pemerintah Daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan daerah dalam satu tahun tertentu. Pada tahun 2010 diproyeksikan total belanja sebesar Rp 1.438.122.535.357,00 menurun sebesar Rp 182.464.349.382,00 atau 11,26 persen dari total belanja pada tahun 2009 sebesar Rp 1.620.586.884.739,00.

Belanja tidak langsung diproyeksikan sebesar Rp 629.790.107.882,40 menurun sebesar Rp 55.876.165.777,60 atau 8,15 persen dibanding tahun 2009 sebesar Rp 685.666.273.660,00. Sedangkan belanja langsung yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan diukur dengan capaian kerja, maka pada tahun 2010 diproyeksikan sebesar Rp 808.332.427.474.60 menurun sebesar Rp 126.588.183.604,40 atau 13,54 persen dari total belanja langsung pada tahun 2009 yaitu Rp 934.920.611.079,00. Fokus kebijakan masih berpijak pada sektor-sektor utama dan penunjangnya, yaitu: pertanian, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang mendukung keempat prioritas pembangunan sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Provinsi Jambi. Keempat sektor tersebut diproyeksikan mencapai porsi sebesar 63,56 persen dari total Belanja Langsung atau 43,78 persen dari total APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2010, Adapun yang termasuk belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, yang dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan yang urusan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota.

4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

Dalam menentukan kebijakan dalam pengalokasian belanja daerah, harus diprioritaskan terlebih dahulu anggaran untuk pembayaran pegawai (gaji pegawai, tunjangan, uang representasi, tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah) selama satu tahun anggaran, serta memperhitungkan kewajiban daerah dalam belanja tidak langsung lainnya seperti belanja bagi hasil kepada Kabupaten/kota; belanja bantuan keluarga; belanja tidak terduga. Disamping itu juga harus diperhitungkan belanja langsung pokok yang harus dilaksanakan oleh masing-masing SKPD untuk menunjang pelaksanaan Tupoksi masing-masing seperti listrik telpon air dan lain-lain yang penggunaannya harus mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran. Listrik telpon air dan lain-lain yang penggunaannya harus mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran.

Dalam RAPBD Tahun Anggaran 2010, total belanja diproyeksikan sebesar Rp 1.438.122.535.357,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Untuk belanja tidak langsung diproyeksikan sebesar Rp 640.771.830.242,40, dengan uraian:

1. Pada Pos Belanja Pegawai diproyeksikan sebesar Rp 373.235.321.582,40 yang terdiri atas komponen belanja gaji pegawai dan tunjangan pegawai;
2. Pada Pos Belanja Hibah diproyeksikan sebesar Rp. 31.200.000.000.000,00 yang digunakan masing-masing sebesar Rp 3.000.000.000,00 untuk Hibah untuk Kota Sungai Penuh sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh; sebesar Rp 3.200.000.000,00 berupa hibah kepada PKK, TMMD, MUI, BAZDA, PMI dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya; serta sisanya sebesar Rp 25.000.000.000,00 berupa hibah Pemerintah Provinsi kepada KPU

dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah/Gubernur;

3. Pada Pos Bantuan Sosial, diproyeksikan sebesar Rp 1.000.000.000,00. yang seyogyanya digunakan untuk bantuan Sosial kepada Partai Politik Pemenang Pemilihan Umum Tahun 2009;
4. Pada Pos Belanja Bantuan Keuangan pada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa diproyeksikan sebesar Rp 15.000.000.000,00 yang terdistribusi pada wilayah Kabupaten/Kota/Desa dalam Provinsi Jambi;
5. Pada pos Biaya Pungut diproyeksikan sebesar Rp 26.539.786.300,00 dengan alokasi Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) dan Biaya Pungut Pajak Daerah (BP-PD) masing-masing sebesar Rp 21.539.786.300,00 dan Rp 5.000.000.000,00.
6. Pada pos bagi hasil untuk Kabupaten/Kota diproyeksikan sebesar Rp 188.796.722.360,00 dengan rincian Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 174.000.000.000,00; Serta Bagi Hasil Kehutanan yang masih terhutang sebesar Rp 3.815.000.000,00;
7. Pada pos Belanja Tak Terduga diproyeksikan sebesar Rp 5.000.000.000,00 yang menempati porsi sebesar 0,35 persen dari total APBD Tahun 2010.

Tabel 2 Rincian Belanja Tidak Langsung APBD Menurut Urusan Perangkat Daerah

No.	URUSAN/ SKPD	2009	2010
	URUSAN WAJIB	626.053.947.900,00	559.090.297.975,60
1	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	15.605.869.330,00	18.172.628.453,20
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	18.275.657.610,00	21.617.021.451,60
3	Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi	33.863.883.020,00	41.186.950.113,60
4	Rumah Sakit Jwa Daerah Provinsi Jambi	7.715.215.725,00	9.320.778.168,40
5	Dinas Pekerjaan Umum	21.907.936.910,00	25.567.154.476,80
6	BAPPEDA	5.970.715.965,00	7.227.234.169,20
7	Dinas Perhubungan	8.225.574.430,00	8.556.190.723,20
8	Badan Lingkungan Hidup	3.000.542.590,00	3.471.683.170,40
9	Badan Pemberdayaan Masy, Perempuan dan KB	4.420.043.705,00	5.120.913.766,00
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19.795.254.894,00	22.720.313.429,60
11	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	4.725.281.665,00	5.525.843.818,00
12	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah	2.656.195.365,00	3.132.147.271,20
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.991.376.105,00	8.302.300.955,20
14	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jambi	2.882.156.195,00	3.430.532.535,60
15	Satuan Polisi Pamong Praja	4.505.732.205,00	5.199.791.014,80
16	Badan Kesbangpol	3.247.295.060,00	8.198.776.925,60
17	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	10.307.151.800,00	10.307.151.800,00
18	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.304.285.000,00	1.565.383.704,00
19	Sekretariat Daerah	36.679.634.012,00	41.516.741.141,60
20	Sekretariat Dewan	3.768.419.211,00	4.018.188.289,20
21	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.759.789.135,00	4.468.675.584,00
22	Inspektorat Provinsi	4.603.046.060,00	5.237.758.470,00
23	Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Jambi	2.289.083.475,00	3.024.810.556,40
24	Dinas Pendapatan	45.357.493.413,00	34.549.321.481,20
25	Biro Keuangan dan Aset (SKPKD)	330.413.143.510,00	227.142.304.800,00
26	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah	3.987.210.830,00	4.775.367.045,60
27	Badan Kepegawaian Daerah	7.257.656.850,00	8.009.718.220,00
28	Kantor Pengolahan Data Elektronik	1.703.411.800,00	2.018.558.436,40
29	Badan Perpustakaan dan Arsip	5.189.126.835,00	6.127.244.448,80
30	Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	5.645.765.195,00	6.578.813.556,00
31	Sekretariat KORPRI	-	750.000.000,00
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	750.000.000,00
33	KPID	-	750.000.000,00
34	Badan Narkotika Provinsi	-	750.000.000,00
	URUSAN PILIHAN	59.612.325.760,00	70.699.809.906,80
35	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	13.583.062.715,00	16.471.116.155,20
36	Dinas Perkebunan	9.575.870.370,00	11.396.495.323,60
37	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11.069.249.420,00	13.140.003.606,80
38	Dinas Kehutanan	7.820.845.605,00	9.224.566.687,20
39	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.930.989.245,00	3.412.368.877,60
40	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.459.875.245,00	6.273.199.832,80
41	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.172.433.160,00	10.782.059.423,60
	TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG	685.666.273.660,00	629.790.107.882,40

b. Belanja Langsung

Sedangkan untuk Belanja Langsung dialokasikan sebesar Rp 808.332.427.474.60. diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian dalam arti luas dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Komponen Belanja Langsung terdiri dari :

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal

Dari sisi belanja ini pemerintah akan terus berupaya melakukan berbagai efisiensi dan efektivitas dengan cara menekan berbagai pengeluaran yang tidak bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan mendorong belanja terutama melalui program dan kegiatan yang lebih menyentuh aspek stimulasi dan multiplier serta terfokus pada tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara proporsional .

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi secara bertahap terus meningkat, namun presentase angka kemiskinan ini masih didominasi oleh penduduk yang berada di pedesaan. Hal ini juga disebabkan oleh Nilai Tukar Petani (NTP) yang masih berada di bawah 100 persen atau satu banding satu. Oleh karena itu, sudah selayaknya program-program pembangunan diarahkan ke daerah-daerah pedesaan terutama daerah-daerah miskin dan berpotensi menjadi miskin. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan UKM merupakan langkah strategis dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Sampai

tahun 2008 dan diperkirakan hingga tahun 2009 sektor pertanian masih dapat memenuhi ketersediaan pangan Provinsi Jambi.

Setelah 3 (tiga) tahun terfokus kepada aspek peningkatan produksi pertanian secara luas, maka untuk tahun 2010 fokus anggaran diarahkan kepada upaya peningkatan distribusi dengan tujuan untuk mengurangi biaya tambahan (*opportunity cost*) yang terbeban pada tingkat petani. Cara efektif adalah dengan menurunkan biaya transportasi dari daerah-daerah produksi melalui peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan dan menfunksikannya sebagai jalur distribusi utama bagi produk-produk sektor primer, serta mendorong Kabupaten/Kota untuk tetap meningkatkan produktivitas wilayah seraya tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi. Hal ini sejalan dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pembagian Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Cara ini bertujuan untuk mengejar peningkatan NTP yang didorong oleh kondisi eksternal sektor pertanian yang tidak mampu dikendalikan oleh para petani.

Peningkatan NTP berarti mendorong berkembangnya kegiatan pertanian dan ekonomi perdesaan yang pada gilirannya meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan petani, nelayan dan masyarakat perdesaan pada umumnya dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan serta menjamin perkembangan perdesaan dan perkotaan yang integratif serta pertumbuhan industri perdesaan yang berkelanjutan. Revitalisasi pertanian dalam arti luas dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota untuk mendukung pencapaian sasaran, penciptaan lapangan kerja terutama di perdesaan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup petani dan nelayan, serta rumah tangga petani dan nelayan. Upaya revitalisasi pertanian terkait erat dengan pembangunan usaha kecil dan menengah. Sasaran yang ingin dicapai dari prioritas pembangunan tersebut antara lain :

- a. Tercapainya pertumbuhan sektor pertanian, termasuk perikanan dan kehutanan serta peternakan.
- b. Terciptanya lapangan kerja berkualitas di Perdesaan, khususnya lapangan kerja non pertanian, yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran.
- c. Terjadinya peningkatan kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat perdesaan yang dicerminkan dari peningkatan pendapatan dan produktivitas pekerja di sektor pertanian.

Arah Kebijakan

Masyarakat perdesaan merupakan bagian terbesar penduduk Provinsi Jambi, dengan kegiatan usaha berbasis pertanian dan sumberdaya lokal lainnya. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat tersebut dilakukan secara menyeluruh baik secara sektoral (sektor pertanian) maupun secara spatial (perdesaan). Pada dasarnya arah kebijakan yang ditempuh adalah untuk mengoptimalkan dan menggali potensi wilayah serta memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola potensi secara produktif dan efisiensi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu beberapa arah kebijakan pembangunan pertanian dan UKM adalah sebagai berikut :

1. Ketahanan Pangan Daerah

Upaya untuk mempertahankan ketahanan pangan daerah difokuskan pada tersedianya kebutuhan beras dari sentra-sentra produksi yang ada di Produksi Jambi dan didukung dengan produksi palawija dan daging. Untuk itu kegiatan Prioritas yang akan dilakukan antara lain :

- a. Pengamanan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi padi sebesar 723.805 ton padi sawah dan 75.606 padi ladang yang dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota penghasil.

- b. Peningkatan efisiensi sistem dan jaringan distribusi pangan yang menjamin keterjangkaun harga bahan pangan.
 - c. Peningkatan Produktivitas dan Produktivitas pangan serta diversifikasi komoditi penghasil pangan pada areal perkebunan.
 - d. Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil untuk menurunkan susut pasca panen.
 - e. Pengembangan sistem perlindungan tanaman dan hewan melalui penerapan dan perluasan upaya pengendalian hama, penyakit dan gulma secara terpadu.
 - f. Pengembangan kawasan sentra peternakan dan integrasi ternak tanaman serta pengelolaan lahan dan air (padang pengembalan ternak, kebun hijauan makan ternak, sertifikasi padang penggembalaan) serta peningkatan pangan ternak yang dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.
 - g. Pengembangan Desa Mandiri Pangan yang dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.
- 2 Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan.

Peningkatan produksi potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan Kehutanan dimaksudkan untuk menciptakan usaha agribisnis yang dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani. Untuk itu, upaya yang dilakukan adalah mengkoordinasikan dengan Kabupaten/Kota pada program-program antara lain :

- a. Pengembangan komoditi pertanian yang memiliki prospek pasar domestik dan internasional, seperti Kentang, Kedelai, Jagung termasuk dalam upaya program peningkatan kedelai 2009.
- b. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Holtikultura dan sayuran spesifik lokasi.
- c. Penyediaan dan pengawasan peredaran dan penggunaan bibit bermutu.

- d. Rehabilitasi, intensifikasi dan ekstensifikasi komoditi karet.
- e. Peningkatan program pendidikan dan pelatihan dan pelatihan bagi para penyuluh pertanian dan petani.
- f. Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida
- g. Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perlindungan usaha perkebunan.
- h. Peningkatan nilai tambah produk pertanian/perikanan melalui pasca panen, peningkatan mutu, pengolahan hasil dan pemasaran.
- i. Pengembangan infrastruktur (sarana prasarana) pertanian, peternakan, perikanan serta perkebunan.
- j. Pengembangan agribisnis peternakan melalui pengembangan sentra, agropolitan, sistim informasi peternakan, penerapan teknologi pemasaran hasil, kelembagaan dan kemitraan usaha.
- k. Peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan berupa bantuan pinjaman Langsung Masyarakat atau bergulir.
- l. Peningkatan usaha perikanan skala kecil dan peningkatan pemasaran, mutu dan nilai tambah produk perikanan.
- m. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.
- n. Pengembangan produk-produk hasil hutan yang bernilai tinggi

3. Pemberdayaan Masyarakat Petani/Nelayan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat pertanian, terutama petani/Nelayan yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumberdaya usaha pertanian. Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam program ini adalah :

- a. Pemberdayaan masyarakat/Petani/Nelayan dalam memanfaatkan teknologi dan informasi pertanian melalui pelatihan dan studi banding
- b. Revitalisasi sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan Kehutanan.

- c. Penumbuhan dan penguatan lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan dan pembudidaya ikan.
 - d. Pemberdayaan Petani melalui pelatihan dan penguatan assosiasi perkebunan
 - e. Penyederhanaan mekanisme dukungan kepada petani dan pengurangan hambatan usaha pertanian/perikanan
 - f. Pengembangan upaya pengentasan kemiskinan melalui perdayaaan petani.
 - g. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
 - h. Penyempurnaan sistem perbenihan serta peningkatan pembangunan sarana prasarana perikanan.
 - i. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup di sekitar hutan (peladang berpindah, pionir hutan atau transmigrasi) dalam pengembangan hutan tanaman yang lesatari.
 - j. Peningkatan rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan air irigasi untuk pertanian.
4. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah
- Arah kebijakan ini akan terwujudnya melalui program Pokok antara lain :
- a. Penciptaan Iklim usaha sentra KUKM
 - b. Pengembangan dan Pendampingan KSP/USP Koperasi penerima dana bergulir.
 - c. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif KUMKM
 - d. Penumbuhan dan Pemberdayaan sentra UKM
 - e. Peningkatan Peran Koperasi dalam mendukung usaha pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan dan waserba.
 - f. Pengembangan Industri Kecil Menengah dan Besar

- g. Pembinaan dan bantuan peralatan industri kecil.
- h. Pengembangan dunia usaha PMDN dan PMA
- i. Peningkatan dan pengembangan ekspor dan perdagangan dalam negeri.

2. Prioritas Pembangunan Infrastruktur

Upaya peningkatan infrastruktur ini diarahkan pada rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi infrastruktur transportasi, energi dan ketenagalistrikan, perumahan dan pemukiman, air minum, air limbah, persampahan dan drainase serta sumberdaya dan sarana umum lainnya. Pembangunan Infrastruktur juga untuk mempercepat pembangunan daerah, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Mengingat daya dukung infrastruktur ekonomi yang masih kurang memadai dan sangat tidak kompetitif dibanding daerah lainnya di Sumatera. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur yang memadai dan sangat tidak kompetitif dibanding daerah lainnya di Sumatera, Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur yang memadai harus dipercepat baik jumlah dan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial, seperti energi, ketenagalistrikan, jalan, air bersih, transportasi, pos dan telematika, pendidikan dan kesehatan. Sasaran Pembangunan infrastruktur adalah :

1. Pendayagunaan sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan irigasi, dan pembangunan infrastruktur pada kawasan banjir serta peningkatan pelayanan daerah irigasi.
2. Meningkatkan sistem jaringan jalan yang ada dalam mendukung interkoneksi antara kawasan produksi dan jalur distribusi menuju daerah pemasaran dan outlet Provinsi Jambi.
3. Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Tenaga Surya serta Jaringan Tegangan Rendah (JTR) pada daerah yang belum terjangkau listrik.
4. Meningkatkan lingkungan perumahan pada kawasan kumuh dan pembangunan jalan setapak.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi, maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya Air.
 - a. Pembangunan dan rehabilitasi pengamanan sungai di daerah rawan banjir di Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Muaro Jambi, Tebo, Merangin, Kerinci dan Kota Jambi.
 - b. Pembinaan Kelompok Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Kerinci, Muaro Jambi, Bungo, Tebo dan Sarolangun dan Kota Jambi.
 - c. Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan rawa di Kabupaten Ma. Jambi, Tebo, Sarolangun, Kerinci dan Kota Jambi.
 - d. Operasional dan Pemeliharaan (O&P)
2. Transportasi
 - a. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di
 - a. Wilayah I
 - b. Wilayah II
 - c. Wilayah III
 - b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi di :
 - a. Wilayah I
 - b. Wilayah II
 - c. Wilayah III
 - c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Jalan Provinsi
 - d. Pemeliharaan Rutin Sistem Mandor pada Ruas Jalan Provinsi
 - e. Peningkatan Jalan dalam Kota
 - f. Percepatan Pembangunan Pelabuhan Ma. Sabak dan Dermaga Ro-Ro dan Dermaga di Pulau Berhala
 - g. Pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan jalan dan penanganan daerah rawan kecelakaan.

h. Peningkatan pelayanan fasilitas Bandara dan Landasan Pacu Sultan Thaha dan Dipati Parbo.

3. Ketenagalistrikan

Perluasan pelayanan tenaga listrik di wilayah perdesaan dan terpencil melalui pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTA) di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo.

4. Perumahan dan Permukiman

a. Penataan dan Revitalisasi kawasan strategis di Provinsi Jambi

b. Pembangunan prasarana dan sarana jalan lingkungan (Poros Desa) di Kabupaten Tebo, Merangin, Sarolangun, Tanjab Timur, Kerinci dan Muara Jambi.

c. Pembangunan sistem air limbah melalui pembangunan Drainase Primer dan sekunder di Kabupaten Merangin, Tanjung Jabung Barat, Sarolangun dan Kota Jambi.

3. Prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas merupakan mandat konstitusi yang harus dilakukan sesuai dengan tujuan negara Indonesia. Pendidikan dan Kesehatan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai pelaku sekaligus objek pembangunan. Dengan kondisi tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk masih relatif rendah, upaya untuk memperbaiki akses penduduk terhadap pendidikan dan kesehatan harus dipercepat untuk mencapai kualitas manusia Indonesia yang sejahtera dan berdaya saing.

Sasaran peningkatan sumber daya manusia diarahkan pada pembangunan pendidikan dan kesehatan diarahkan untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan dan taraf pendidikan masyarakat melalui peningkatan akses, terutama penduduk miskin, terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

Secara lebih rinci sasaran pembangunan pendidikan dan kesehatan antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Persentase Penduduk yang Dapat Mengakses Pelayanan Pendidikan yang diukur antara lain dengan :
 1. Meningkatkan angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD/SMP/SMA dan APK jenjang pendidikan tinggi.
 2. Meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS)
 3. Menurunkan angka partisipasi sekolah
- b. Meningkatkan Akses Masyarakat untuk mendapatkan Pendidikan Kecakapan Hidup.
- c. Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Pendidikan antar Kelompok Masyarakat termasuk antara Wilayah dan Tertinggal, antara Perkotaan dan Perdesaan, antara Daerah Maju dan Daerah Tertinggal, antara Penduduk Kaya dan Penduduk Miskin, serta antara Penduduk Laki-Laki dan Perempuan.
- d. Meningkatnya kualitas dan Relevansi Pendidikan.
- e. Meningkatnya Proporsi Keluarga yang Hidup secara Bersih dan Sehat.
- f. Meningkatnya Proporsi Masyarakat untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan Baik dari Polindes, Puskesmas, Rumah Sakit, maupun Tenaga Kesehatan Terlatih.
- g. Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Malaria
- h. Menurunnya Prevalensi Kurang Gizi pada Balita dan
- i. Meningkatnya Ketersediaan Obat Esensial Nasional.

Arah Kebijakan

Sebagai salah satu pilar terpenting dalam upaya untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, pembangunan pendidikan dan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Perhatian khusus diberikan pada pelayanan bagi masyarakat miskin dan penduduk di daerah

tertinggal dan daerah bencana. Secara lebih rinci arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemerataan dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, yang dilaksanakan melalui :
 - a. Penyelenggaraan wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun yang bebas biaya bagi penduduk miskin yang didukung dengan upaya penarikan kembali siswa putus sekolah dan yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan, serta pemberian perhatian pada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, serta penambahan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan daya tampung dan daya jangkau pendidikan dasar.
 - b. Peningkatan intensitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional terutama bagi penduduk usia 15 tahun keatas dimulai dengan daerah-daerah yang memiliki angka buta aksara tertinggi dan wilayah perdesaan.
 - c. Perluasaan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal antara lain melalui penambahan sarana dan prasarana pendidikan menengah terutama di wilayah perdesaan dan daerah yang memiliki angka partisipasi lebih rendah dibanding rata-rata nasional dan meningkatkan relevansinya dengan kebutuhan dunia kerja.
 - d. Peningkatan jumlah dan jaringan puskesmas melalui pembangunan, perbaikan dan pengadaan peralatan medis dan non medis Puskesmas dan jaringannya terutama di daerah bencana dan tertinggal dan
 - e. Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dengan melanjutkan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan kelas III rumah sakit.
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, yang dilaksanakan melalui :
 - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan peningkatan jumlah peserta didik.

- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan kualitas pendidikan seperti perpustakaan dan laboratorium.
 - c. Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model-model pembelajaran yang mengacu pada standar nasional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni dan kebutuhan pembangunan daerah wilayah dan kawasan.
 - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan antara lain melalui pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit kabupaten/kota khususnya di daerah terpencil dan bencana.
 - e. Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar melalui peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar.
4. Pembangunan Pendidikan juga diarahkan untuk Meningkatkan Relevansi dengan kebutuhan Pembangunan melalui antara lain: Peningkatan Intensitas pendidikan non formal dalam rangka mendukung upaya penurunan jumlah pengangguran dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
5. Memperkuat Manajemen Pelayanan Pendidikan yang dilaksanakan melalui :
- a. Penyusunan sistem dan mekanisme Perencanaan dan Pengelolaan pendidikan
 - b. Pengaturan inventarisasi dan sistem dokumentasi sarana dan prasarana serta asset pendidikan.
 - c. Penguatan Sistem Informasi Pendidikan
 - d. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendidikan
 - e. Penciptaan sistem pengawasan yang profesional dan objektif
 - f. Penyediaan data yang terkini dan akurat.

6. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, yang dilaksanakan melalui :
 - a. Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat antara lain meliputi peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku hidup sehat, pengawasan kualitas lingkungan, dan pengembangan kesehatan sistem wilayah dan
 - b. Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini antara lain meliputi pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat seperti pos pelayanan terpadu, pondok bersalin desa dan usaha kesehatan sekolah.
7. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit menular dan Wabah Kegiatan yang dilakukan antara lain :
 - a. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
 - b. Peningkatan Imunisasi
 - c. Peningkatan Suveilensi
 - d. Penemuan dan Tata laksana Penderita
8. Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Gizi Buruk kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :
 - a. Peningkatan Pendidikan Gizi Masyarakat
 - b. Penanggulangan Kurang energi protein, anemia gizi besi dan akibat gangguan kurang yodium.
9. Peningkatan Ketersediaan Obat Generik Esensial, Pengawasan Obat, makanan dan Keamanan Pangan yang dilaksanakan melalui:
 - a. Peningkatan pengawasan obat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA)
 - b. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.
 - c. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan produk obat.

- d. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan.

4. Prioritas Pembangunan Sumberdaya Alam dan Pariwisata

Dalam perpektif pembangunan yang berkelanjutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak hanya dapat dijadikan sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) tapi juga berfungsi sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Bagi Provinsi Jambi, sumber daya alam seperti pertambangan dan pertanian sangat berperan sebagai sumber perekonomian daerah, dan masih sangat signifikan perannya di masa mendatang. Namun untuk Provinsi Jambi, secara umum pengelolaan SDA yang dikelola masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, bahkan cenderung agresif, eksploitatif dan ekspansif sehingga daya dukung lingkungan menurun, ketersediaan SDA menipis, bahkan cenderung sudah berada pada tahap yang sangat mengkuatirkan. Hal ini sangat terlihat sampai saat ini meskipun pembalakan liar (*Illegal Logging*) dan tebang berlebih (*Over Cutting*) serta penyelundupan kayu ke luar negeri yang telah mempercepat pengurangan sebagian besar hutan di Provinsi Jambi sudah mulai mereda, namun okupansi lahan hutan oleh masyarakat mulai tumbuh menjadi permasalahan yang serius. Sedangkan upaya pengembangan kebudayaan diarahkan pada nilai-nilai luhur dan pelestarian kekayaan budaya, yang meliputi sejarah kepurbakalaan dan benda cagar budaya.

Sasaran

- a. Pengelolaan Sumberdaya Alam :
 1. Peningkatan keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi (kontribusi sektor perikanan, kehutanan, pertambangan dan mineral terhadap PDRB Provinsi Jambi).
 2. Penegakan hukum dengan tetap menkedepankan pemberantasan pembalakan liar (*illegal Logging*), turunya penyalahgunaan izin

- eksploitasi hasil hutan dan peredaran/perdagangan hasil hutan illegal, serta yang berkaitan dengan masalah okupansi lahan hutan.
3. Optimalisasi nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu.
 - a. Turunnya angka pelanggaran dan perusakan sumber daya pesisir dan laut dan membaiknya pengelolaan ekosistem pesisir dan laut yang berbasis masyarakat.
 - b. Berkurangnya kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) dan usaha-usaha pertambangan yang merusak dan menimbulkan pencemaran.
 4. Pengembangan Pariwisata melalui :
 - a. Pengembangan destinasi dan jenis wisata unggulan.
 - b. Pengembangan jaringan kerjasama pariwisata dan kebudayaan
 - c. Pengembangan nilai budaya daerah.
 - d. Pengembangan pemasaran pariwisata.

Arah Kebijakan

Arah dan kebijakan yang menempuh untuk pengembangan dalam pengelolaan Sumberdaya alam dilakukan melalui :

1. Pembangunan kehutanan diarahkan untuk :
 - a. Penurunan kegiatan dan perdagangan kayu illegal, pembakaran hutan serta okupansi kawasan hutan.
 - b. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan melalui meningkatnya keterlibatan masyarakat secara langsung di dalam dan disekitar hutan.
 - c. Meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, serta meningkatnya pengawasan dan penegakan hukumnya.
 - d. Peningkatan pelaksanaan Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan.
 - e. Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan.

- f. Memanfaatkan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungannya secara optimal.
2. Pembangunan Kelautan diarahkan untuk :
 - a. Mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut, pesisir secara lestari berbasis masyarakat.
 - b. Membangun sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, yang disertai dengan penegakan hukum yang ketat.
 - c. Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir serta merehabilitasi ekosistem yang rusak.
 - d. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut, perairan tawar.
 - e. Menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir.
 3. Pembangunan pertambangan diarahkan untuk :
 - a. Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan, khususnya mempertimbangkan kerusakan hutan, keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan.
 - b. Meningkatkan akurasi data, promosi dan pelayanan informasi mineral, batubara, air bawah tanah dan panas bumi.
 - c. Menginventarisasi dan merehabilitasi lahan dan kawasan pasca tambang.
 - d. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan.
 - e. Meningkatkan pelayanan dan informasi pertambangan.
 4. Arah kebijakan pengembangan kebudayaan dan Pariwisata yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur dilakukan melalui :
 - a. Pengembangan Pemasaran Pariwisata melalui penyelenggaraan even daerah, even dalam dan luar negeri, promosi melalui media cetak maupun elektronik.

- b. Pengembangan Destinasi pariwisata, dilakukan melalui pengembangan daya tarik wisata, peningkatan mutu pelayanan usaha sarana dan jasa pariwisata.
- c. Pengelolaan kekayaan budaya dilakukan melalui peningkatan apresiasi seni, transkripsi dan transliteransi naskah kuno.
- d. Pengelolaan Ragam budaya dilakukan melalui sarasehan dan seni budaya, festival ragam budaya.

4.2.4. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Tabel 3. Rincian Belanja Langsung APBD Menurut Urusan Perangkat Daerah

No.	URUSAN/ SKPD	2009	2010
	URUSAN WAJIB	762.095.963.529,00	712.082.427.474,60
1	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	175.300.859.451,00	219.000.000.000,00
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	12.213.808.250,00	12.300.000.000,00
3	Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi	39.054.929.350,00	48.170.000.000,00
4	Rumah Sakit Jwa Daerah Provinsi Jambi	9.520.213.200,00	8.175.000.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	338.891.400.000,00	226.150.000.000,00
6	Bappeda	7.234.836.500,00	6.000.000.000,00
7	Dinas Perhubungan	6.333.251.000,00	11.000.000.000,00
8	Badan Lingkungan Hidup	3.366.445.800,00	3.000.000.000,00
9	Badan Pemberdayaan Masy, Perempuan dan KB	5.621.662.387,00	5.550.000.000,00
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.064.793.500,00	8.500.000.000,00
11	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	2.586.386.000,00	3.500.000.000,00
12	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah	4.646.364.000,00	4.000.000.000,00
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.861.461.500,00	6.000.000.000,00
14	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jambi	13.566.282.500,00	12.866.282.000,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	2.879.854.550,00	3.280.000.000,00
16	Badan Kesbangpol	2.562.508.000,00	3.000.000.000,00
17	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	3.100.000.000,00
18	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-
19	Sekretariat Daerah	59.100.590.563,00	63.435.719.474,60
20	Sekretariat Dewan	20.181.743.750,00	17.208.000.000,00
21	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.437.136.200,00	3.250.000.000,00
22	Inspektorat Provinsi	5.394.799.800,00	5.750.000.000,00
23	Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Jambi	8.155.812.168,00	6.500.000.000,00
24	Dinas Pendapatan	10.783.263.280,00	8.150.000.000,00
25	Biro Keuangan dan Aset (SKPKD)	-	-
26	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah	3.837.242.500,00	4.197.426.000,00
27	Badan Kepegawaian Daerah	5.006.570.000,00	4.000.000.000,00
28	Kantor Pengolahan Data Elektronik	2.142.351.000,00	2.000.000.000,00
29	Badan Perpustakaan dan Arsip	3.428.403.280,00	3.000.000.000,00
30	Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	4.929.417.000,00	5.000.000.000,00
31	Sekretariat KORPRI	-	1.000.000.000,00
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	2.500.000.000,00
33	Sekretariat KPID	-	1.000.000.000,00
34	Badan Narkotika Provinsi	-	1.500.000.000,00
	URUSAN PILIHAN	172.824.647.550,00	96.250.000.000,00
35	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	15.679.303.000,00	9.500.000.000,00
36	Dinas Perkebunan	74.595.261.000,00	50.000.000.000,00
37	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	28.815.350.550,00	9.500.000.000,00
39	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.599.717.000,00	3.250.000.000,00
40	Dinas Kelautan dan Perikanan	28.992.770.000,00	11.000.000.000,00
41	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.889.849.000,00	6.000.000.000,00
	TOTAL BELANJA LANGSUNG (BL)	934.920.611.079,00	808.332.427.474,60

4.3. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksud untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami defisit dimana belanja lebih besar daripada pendapatan daerah, maka penggunaannya dapat didanai dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA). Diproyeksikan sisa lebih anggaran tahun 2009 mencapai Rp 200.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk mencukupi belanja pada tahun 2010.

Tabel. 4. Rencana dan Target Pembiayaan Daerah

No	Pembiayaan Daerah	Tahun Anggaran		Selisih (000)	%
		2009 (000)	2010 (000)		
I	Penerimaan Daerah	386.301.605,00	200.000.000,00	(186.301.605,00)	-48,23
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SLPA)	386.301.605,00	200.000.000,00		
II	Pengeluaran Pemerintah	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	-100,00
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.000.000,00	-		
Jumlah Pembiayaan		377.301.605,00	200.000.000,00	(177.301.605,00)	-46,99

BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2010 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagaijabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2010 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2010 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2010 Karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah.